

PENGARUH RASIO EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN KEMANDIRIAN DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DI PROVINSI ACEH

Sarah Lumbantoruan¹⁾, Fakriah²⁾, Yeni Irawan³⁾

^{1),2),3)}Politeknik Negeri Lhokseumawe

Email : sarahsihombing09@gmail.com¹⁾, fakriah@pnl.ac.id²⁾, irawanveni1006@gmail.com³⁾

Abstract: *This study aims to analyze the effect of the effectiveness ratio, efficiency ratio, and independence ratio on capital expenditure in district/city governments in Aceh Province using data on Local Own-Source Revenue (PAD), Central Government Transfers, Regional Revenue, Capital Expenditure, and Regional Expenditure. This research employs a quantitative approach with regression analysis. The results indicate that the selected panel data regression model is the Fixed Effect Model (FEM). Partially, the effectiveness ratio has a positive and significant effect on capital expenditure with a tvalue 2.238 and a significance level of 0.027; the efficiency ratio has a positive and significant effect on capital expenditure with a tvalue 3.817 and a significance level of 0.0002; and the independence ratio has a positive and significant effect on capital expenditure with a tvalue 5.831 and a significance level of 0.0076. Simultaneously, the effectiveness ratio, efficiency ratio, and independence ratio significantly affect capital expenditure, with a coefficient of determination (R^2) of 66.5%, while the remaining 33.5% is influenced by other factors outside the research model. Therefore, improvements in regional financial effectiveness, efficiency, and independence can strengthen the fiscal capacity of local governments in increasing capital expenditure allocations to support sustainable regional development.*

Keywords: *Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Independence Ratio, Capital Expenditure.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kemandirian terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi yang menggunakan data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer dari Pusat, Pendapatan Daerah, Belanja Modal dan Belanja Daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis regresi data panel yang memenuhi atau terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM), dengan secara parsial rasio efektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal dengan nilai thitung sebesar 2,238 dan signifikansi 0,027, rasio efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal dengan nilai thitung sebesar 3,817 dan signifikansi 0,0002, serta rasio kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal dengan nilai thitung sebesar 5,831 dan signifikansi 0,0076. Secara simultan, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kemandirian berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dengan koefisien

determinasi (R^2) sebesar 66,5%, sedangkan sisanya sebesar 33,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Dengan demikian, peningkatan efektivitas, efisiensi, dan kemandirian keuangan daerah dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam meningkatkan alokasi belanja modal guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Belanja Modal.

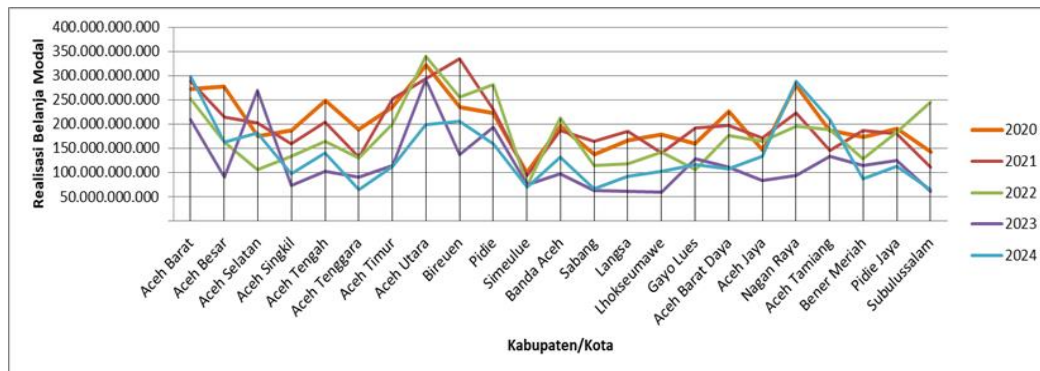
PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja pemerintah sebagai bagian dari reformasi fiskal, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kemendagri mendorong optimalisasi APBD agar lebih berpihak pada belanja produktif, terutama belanja modal sebagaimana diatur dalam Permendagri 77 tahun 2020 mengenai pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk membeli atau meningkatkan aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat terhadap kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, peralatan, mesin, dan lain-lain.

Belanja modal juga berperan penting dalam mendorong produktivitas ekonomi daerah, karena pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang menciptakan iklim investasi yang kondusif serta memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satu instrument penting yang mendukung pembangunan tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melalui APBD pemerintah daerah dapat menetapkan arah kebijakan pembangunan dan menentukan sejauh mana kemampuan keuangan daerah dialokasikan untuk belanja modal, dengan demikian struktur dan proporsi belanja modal dalam APBD dapat menjadi indikator komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik (Akbar et al., 2022).

Dalam konteks keuangan daerah belanja modal tidak hanya mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur fisik, tetapi juga menunjukkan ruang fiskal, keberlanjutan pembangunan, serta prioritas kebijakan jangka panjang. Perspektif ini dipertegas oleh Kementerian Keuangan (2022) yang menegaskan bahwa belanja modal adalah instrumen krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan meningkatkan standar layanan publik.

Grafik 1. Tren Belanja Modal daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2020-2024



Sumber: djpk.kemenkeu

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh juga menunjukkan adanya ketimpangan dan fluktuasi yang cukup signifikan selama periode 2020–2024. Berdasarkan grafik realisasi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Aceh, terlihat bahwa sebagian besar daerah mengalami perubahan realisasi belanja modal dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan aset publik belum merata serta masih mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu.

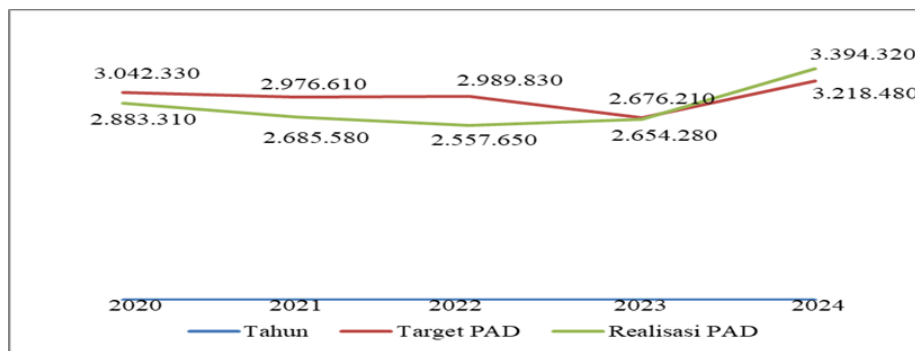
Berdasarkan kondisi diatas, dapat dipahami bahwa keberhasilan belanja modal pemerintah tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi juga oleh kualitas kinerja keuangan daerah itu sendiri. Seftyawati dan Rahayu (2019) membuktikan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap belanja modal, yang dimana daerah dengan kinerja keuangan yang lebih baik cenderung mengalokasikan anggaran lebih besar pada belanja pembangunan, dengan temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja menjadi faktor penting dalam menentukan arah kebijakan belanja modal.

Penilaian kinerja keuangan daerah dilakukan agar pengelola keuangan tidak semena-mena dalam membelanjakan uang anggaran, tetapi menjadi lebih fokus terhadap target-target kinerja yang harus dicapai, dengan adanya pengukuran ini dapat dimanfaatkan untuk melihat ada tidaknya penyimpangan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan, kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui beberapa rasio keuangan yaitu rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kemandirian, (Fernanda et al., 2023).

Rasio efektivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang telah direncanakan dibandingkan dengan target

yang ditetapkan berdasarkan potensi asli daerah, kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dihasilkan mencapai minimal 1 (satu) atau 100% karena semakin tinggi rasio efektivitas maka menggambarkan kinerja daerah semakin baik (Putri dan Rahmawati 2019). Tingkat efektivitas pendapatan daerah memiliki implikasi langsung terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah, daerah dengan rasio efektivitas yang tinggi cenderung memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk mengalokasikan anggaran pada belanja modal, karena hal itu pemerintah daerah mempunyai investasi publik melalui pembangunan infrastruktur dan penyediaan aset tetap lainnya (Mardiasmo, 2018).

Grafik 2. Tren Target PAD dan Realisasi Provinsi Aceh tahun 2020-2024



Sumber: djpk.kemenkeu

Fenomena efektivitas keuangan daerah di Provinsi Aceh dapat dilihat dari perkembangan target PAD dan realisasi PAD selama periode 2020–2024 yang menunjukkan pola fluktuatif. Berdasarkan grafik target PAD dan realisasi PAD kabupaten/kota di Provinsi Aceh, terlihat bahwa sebagian besar daerah mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh dan merealisasikan pendapatan asli daerah belum sepenuhnya stabil. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dan penyediaan layanan publik secara berkelanjutan.

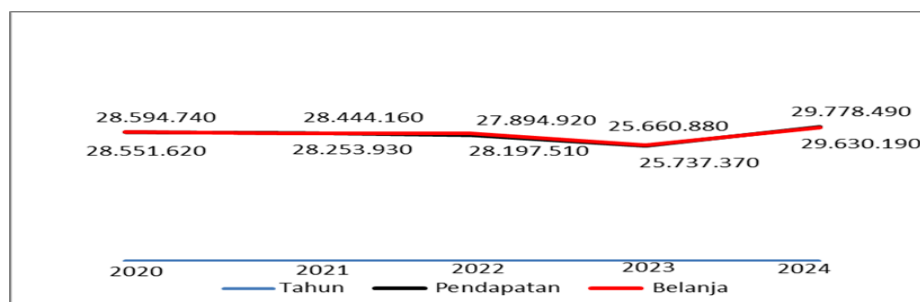
Penelitian Anynda dan Hermanto (2021), Zainul dan Tanjung (2022) menemukan bahwa daerah dengan tingkat efektivitas pendapatan yang tinggi memiliki kemampuan yang cenderung lebih baik dalam meningkatkan belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pendapatan daerah merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan kapasitas pemerintah dalam membiayai pembangunan publik secara berkelanjutan.

Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa rasio efektivitas keuangan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, Seftyawati dan Rahayu (2021) menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hasil serupa dapat ditemukan dalam penelitian Ardhini (2011) yang menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah berperan paling penting dalam meningkatkan belanja modal pemerintah daerah.

Rasio efisiensi keuangan daerah juga merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kemampuan pemerintah daerah mengelola keuangan secara hemat, tepat guna, dan optimal. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah, sehingga dapat menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menekan pengeluaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Menurut Mardiasmo (2018), efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan kemampuan pemerintah mencapai hasil yang optimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal.

Dalam konteks belanja modal, tingkat efisiensi keuangan daerah memiliki hubungan yang penting terhadap kemampuan pemerintah daerah menyediakan anggaran pembangunan. Daerah yang mampu mengelola belanja secara efisien cenderung memiliki sisa kapasitas anggaran yang lebih besar untuk dialokasikan pada belanja modal, seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan sarana pelayanan publik lainnya. Sebaliknya, apabila pengeluaran daerah tidak terkendali, maka sebagian besar anggaran akan terserap untuk belanja rutin sehingga alokasi belanja modal menjadi terbatas.

Grafik 3. Tren Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Aceh tahun 2020-2024



Sumber: djpk.kemenkeu

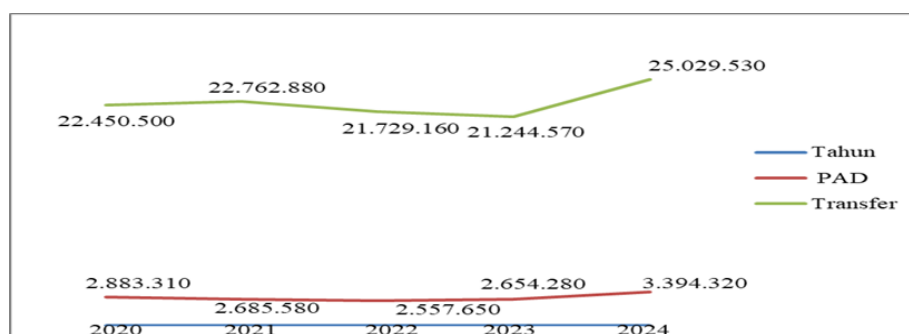
Fenomena efisiensi keuangan daerah di Provinsi Aceh dapat dilihat dari perkembangan pendapatan dan belanja daerah selama periode 2020–2024. Berdasarkan grafik pendapatan dan belanja kabupaten/kota di Provinsi Aceh, terlihat bahwa sebagian besar daerah mengalami perubahan dari tahun ke tahun, bahkan seluruh pendapatan dipergunakan untuk belanja daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam mengendalikan pengeluaran agar penggunaan anggaran dapat dilakukan secara lebih optimal dan efisien. Tingginya proporsi belanja terhadap pendapatan mengindikasikan bahwa ruang fiskal yang tersedia untuk mendukung pembangunan daerah masih terbatas.

Penelitian Auliya dan Hidajat (2023) menemukan bahwa rasio efisiensi berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang mampu mengelola anggaran secara efisien memiliki peluang lebih besar dalam meningkatkan alokasi belanja modal. Namun, penelitian Muzaki dan Hapsari (2022) menunjukkan hasil berbeda, yaitu rasio efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara efisiensi keuangan daerah dan belanja modal masih perlu dikaji kembali, khususnya pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Rasio kemandirian keuangan daerah juga merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan belanjanya melalui pendapatan asli daerah tanpa bergantung yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (Ardhini, 2011). Tingkat kemandirian yang tinggi mencerminkan kemampuan fiskal daerah yang kuat serta fleksibilitas dalam menentukan prioritas pembangunan, pemerintah daerah yang mandiri secara finansial memiliki keluasan yang lebih besar dalam mengalokasikan belanja modal sesuai dengan kebutuhannya dan potensi daerah (Zainul dan Tanjung, 2022), yang dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal pemerintah.

Grafik 4.. Tren PAD dan Transfer Provinsi Aceh tahun 2020-2024



Sumber: djpk.kemenkeu

Fenomena kemandirian keuangan daerah di Provinsi Aceh dapat dilihat dari perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer selama periode 2020–

2024. Berdasarkan grafik PAD dan transfer kabupaten/kota di Provinsi Aceh, terlihat bahwa perbandingan yang sangat besar dari tahun ke tahun. Besarnya selisih antara PAD dan dana transfer tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih relatif rendah karena kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah belum mampu mengimbangi besarnya dana transfer yang diterima.

Penelitian Zulkarnain et al. (2017), Zainul dan Tanjung (2022) menemukan bahwa daerah dengan tingkat kemandirian keuangan yang rendah cenderung memiliki alokasi belanja modal yang lebih kecil dibandingkan daerah yang lebih mandiri secara fiskal, karena hal itu menunjukkan bahwa peningkatan kemandirian keuangan daerah menjadi faktor strategis dalam mendorong optimalisasi belanja modal pemerintah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penting untuk melakukan analisis menyeluruh tentang bagaimana rasio efektivitas, efisiensi dan kemandirian mempengaruhi belanja modal. Alasan penting dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran empiris tentang sejauh mana tingkat rasio efektivitas, efisiensi dan kemandirian pelaksanaan anggaran berkontribusi terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2020 – 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sekunder untuk menganalisis pengaruh Rasio Efektivitas, Efisiensi, dan Kemandirian Daerah terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2020-2024. Data ini diolah menggunakan aplikasi EViews 13.0 dan dianalisis secara statisika.

A. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan menelusuri, mencatat, dan mengolah dokumen resmi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Data dikumpulkan dari dokumen www.djpk.kemenkeu.go.id. Data yang diperoleh kemudian disusun dalam bentuk data panel, sehingga dapat digunakan untuk analisis kuantitatif sesuai dengan tujuan penelitian.

B. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Analisis Deskriptif, kemudian dilanjutkan pemilihan model terbaik antara (Common Effect Model, Fixed Effect Model, Random Effect Model), untuk

pemilihan modal terbaik maka di lakukan (Uji Chow, Uji Hausman, Uji Lagrange Multiplier), setelah model terpilih maka dilakukan Pengujian Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolineritas, Uji Heteroskedastisitas), selanjutnya dilakukan Regresi Data Panel dengan persamaan $\ln Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \epsilon_{it}$, selanjutnya dilakukan Uji Hipotesis (Parsial, Simultan, Koefisien Determinasi).

C. Operasional Variabel

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Cara ukur	Kriteria Penilaian	Skala
Rasio Efektivitas M Muzaki dan Hapsari (2022), Fernand <i>et al</i> (2023)	Rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD sesuai target yang ditetapkan	Total target PAD dan total realisasi PAD	(Realisasi PAD / (Target PAD) $\times 100\%$ Sumber: M Muzaki dan Hapsari (2022).	> 100% (Sangat Efektif) 90% - 100% (Efektif) 80% - 90% (Cukup Efektif) 60% - 80% (Kurang Efektif) <60% (Tidak Efektif)	Rasio
Rasio Efisiensi (Putra <i>et al.</i> 2025, Kusuma & Budiwitjaksono 2023).	Rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah menggunakan anggaran belanja secara hemat dan optimal.	Total realisasi belanja dan total realisasi pendapatan	(Realisasi Belanja / (Realisasi Pendapatan) $\times 100\%$ Sumber: Kusuma & Budiwitjaksono (2023).	> 100% (Tidak Efisien) 90% - 100% (Kurang Efisien) 80% - 90% (Cukup Efisien) 60% - 80% (Efisien) <60% (Sangat Efisien)	Rasio
Rasio Kemandirian Daerah M Muzaki dan	Rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan	Total realisasi PAD dan total realisasi pendapatan transfer	(Realisasi PAD / (Pendapatan transfer) $\times 100\%$ Sumber: M Muzaki dan	75% - 100% (Tinggi) 50% - 75% (Sedang) 25% - 50% (Rendah) 0% - 25% (Sangat Rendah)	Rasio

Hapsari (2022), Fernand <i>et al</i> (2023)	pemerintahnya melalui PAD tanpa bergantung yang tinggi terhadap dana transfer pusat.		Hapsari (2022).		
Belanja Modal M Muzaki dan Hapsari (2022), Fernand <i>et al</i> (2023)	Pengeluaran anggaran daerah untuk memperoleh atau menambah aset tetap yang memberi manfaat lebih dari satu tahun anggaran yang dapat digunakan oleh publik	Nilai total realisasi belanja modal (Rp) yang ditransformasikan ke dalam logaritma natural (Ln)	Total realisasi belanja modal (Rp) yang ditransformasikan ke dalam logaritma natural (Ln). Sumber: Rahmadi, S. (2025).	-	Rasio

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Deskriptif

Tabel 2. Analisis Deskriptif

	<i>n</i>	Mean	Maximum	Minimum	SD
Efektivitas	115	95,8	183,6	13,6	22,5
Efisiensi	115	100,1	115,2	89,0	3,5
Kemandirian	115	12,7	36,2	2,0	5,8
Belanja Modal	115	25,8	28,5	24,8	0,5

Sumber: Hasil olah data EViews 13.0

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rasio efektivitas pada pemerintah daerah di Provinsi Aceh periode 2020-2024 memiliki nilai rata-rata sebesar 95,8% dengan nilai maksimum 183,6% dan nilai minimum 13,6%. Nilai tertinggi rasio efektivitas tercatat pada

Kabupaten Simeulue tahun 2021, sedangkan nilai terendah tercatat pada Kota Subulussalam tahun 2022. Tingginya rasio efektivitas pada Kabupaten Simeulue dapat dipahami karena target pendapatan daerah relatif lebih kecil dibandingkan realisasi yang diterima, sehingga pencapaian realisasi pendapatan terlihat sangat tinggi secara rasio. Kondisi ini umumnya terjadi pada daerah kepulauan dan wilayah dengan basis fiskal terbatas, di mana perencanaan target dilakukan secara konservatif. Sebaliknya, rendahnya rasio efektivitas pada Kota Subulussalam tahun 2022 dapat dijelaskan oleh tidak tercapainya target pendapatan yang telah ditetapkan, yang secara umum dapat dipengaruhi oleh keterbatasan basis ekonomi daerah serta ketergantungan pada sektor tertentu yang bersifat fluktuatif.

Selanjutnya rasio efisiensi memiliki nilai rata-rata sebesar 100,1% dengan nilai maksimum 115,2% dan nilai minimum 89%. Nilai tertinggi rasio efisiensi tercatat pada Kota Subulussalam tahun 2022, sedangkan nilai terendah tercatat pada Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2023. Tingginya rasio efisiensi pada Kota Subulussalam menunjukkan bahwa realisasi belanja relatif lebih besar dibandingkan dengan realisasi pendapatan, yang secara rasio mencerminkan tingkat efisiensi yang rendah. Kondisi ini umumnya terjadi ketika belanja daerah tetap harus dikeluarkan meskipun pendapatan tidak optimal. Sebaliknya, rendahnya rasio efisiensi pada Kabupaten Aceh Tenggara mengindikasikan bahwa pengelolaan belanja relatif lebih terkendali terhadap pendapatan yang tersedia, sehingga penggunaan anggaran terlihat lebih efisien secara rasio.

Rasio kemandirian memiliki nilai rata-rata sebesar 12,7%, dengan nilai maksimum 36,2% dan minimum 2%. Nilai tertinggi rasio kemandirian tercatat pada Kota Banda Aceh tahun 2022, sedangkan nilai terendah tercatat pada Kota Subulussalam tahun 2022. Tingginya rasio kemandirian pada Kota Banda Aceh dapat dijelaskan karena struktur perekonomian perkotaan yang lebih maju, basis Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih luas, serta aktivitas jasa dan perdagangan yang relatif lebih berkembang. Sebaliknya, rendahnya rasio kemandirian pada Kota Subulussalam mencerminkan bahwa sebagian besar pendapatan daerah masih bersumber dari dana transfer pemerintah pusat, yang merupakan karakteristik umum daerah pemekaran dengan kapasitas fiskal yang masih terbatas.

Variabel belanja modal memiliki nilai rata-rata sebesar 25,8 ln, dengan nilai maksimum 28,5 ln dan nilai minimum 24,8 ln. Nilai tertinggi belanja modal tercatat pada Kabupaten Pidie tahun 2021, sedangkan nilai terendah tercatat pada Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2024. Tingginya belanja modal pada Kabupaten Pidie dapat dipahami karena kebutuhan

pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas publik yang relatif besar, sejalan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk. Sementara itu, rendahnya belanja modal pada Kabupaten Aceh Tenggara dapat dikaitkan dengan keterbatasan kapasitas fiskal daerah, sehingga prioritas anggaran lebih difokuskan pada belanja rutin dan pelayanan dasar.

2. Pemilihan Model Terbaik

- a. Uji Chow, pengujian ini dilakukan untuk menentukan pilihan model antara *fixed effect model* atau *common effect model*. Kriteria pengujian jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka keputusan pengujian adalah menerima H_a dan menolak H_o . Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian akan diestimasi menggunakan *fixed effect model* (FEM). Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar atau sama dengan $0,05$ ($\text{Prob.} \geq 0,05$), maka keputusan pengujian adalah menerima H_o dan menolak H_a , yang berarti data penelitian akan diestimasi menggunakan *common effect model* (CEM).

Tabel 2. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests Equation: Panel_Test Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.755079	(22,89)	0.0344
Cross-section Chi-square	41.440934	22	0.0073

Cross-Section F	Prob.	Keputusan
1,755	0,034	Fixed Effect Model (FEM)

Sumber: Hasil olah data EViews 13.0

- b. Uji Hausman dilakukan untuk menentukan pilihan model antara *fixed effect model* dengan *random effect model*. Kriteria pengujian jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka keputusan pengujian adalah menolak H_o dan menerima H_a . Sebaliknya, jika nilai probabilitas $\geq 0,05$, maka H_o diterima yang berarti *random effect model* lebih sesuai digunakan.

Tabel 3. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: PANEL_TEST			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.874519	3	0.0310

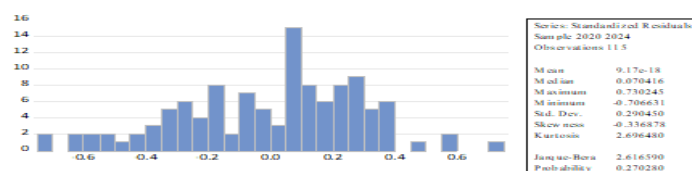
χ^2	Prob.	Kesimpulan
8,874	0,031	Fixed Effect Model (FEM)

Sumber: Hasil olah data EViews 13.0

3. Uji Asumsi Klasik

- a. Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah residual (e_i) dalam model regresi memiliki distribusi yang normal atau tidak. Metode statistik yang digunakan adalah jarque-bera test dengan kriteria pengujian jika nilai prob.Jb yang dihasilkan lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi telah terdistribusi secara normal.

Tabel 4. Uji Normalitas



J-B	Prob.	Keputusan
2,616	0,270	Normal

Sumber: Hasil olah data EViews 13.0

- b. Uji Multikolinearitas merupakan suatu kondisi adanya hubungan yang sangat kuat di antara beberapa atau semua variabel bebas yang dilibatkan kedalam model regresi. Dalam regresi menggunakan data panel, masalah multikolinearitas ini dapat dideteksi dari nilai *centered variance inflation factor* (VIF). Jika nilai centered VIF ini bernilai kurang dari 10, dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari multikolinearitas.

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF
Rasio Efektifitas	1,419
Rasio Efisiensi	1,292
Rasio Kemandirian	1,218

Sumber: Hasil olah data EViews 13.0

- c. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji homogenitas varians residual dalam model regresi.

Tabel 6. Uji heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	1.107527	Prob. F(3,111)	0.3492
Obs*R-squared	3.342268	Prob. Chi-Square(3)	0.3418
Scaled explained SS	3.015425	Prob. Chi-Square(3)	0.3893

Test	Obs*R-sq	Prob.	Keputusan
Glejser	3,342	0,341	Homoskedastisitas

Sumber: Hasil olah data EViews 13.0

4. Analisis Regresi Data Panel

Tabel 7. Hasil Pengujian Regresi Data Panel (Fixed Effect Model)

Dependent Variable: Belanja Modal (Y)				
Method: Panel Least Squares				
Date: 04/29/26 Time: 15:25				
Sample: 2020 2024				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 23				
Total panel (balanced) observations: 115				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20.76310	1.063611	19.52132	0.0000
Efektivitas (X1)	0.004560	0.002037	2.238841	0.0277
Efisiensi (X2)	0.042789	0.011207	3.817999	0.0002
Kemandirian (X3)	0.022756	0.008332	2.731041	0.0076
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummv variables)				
R-squared	0.665427	Mean dependent var		25.77163
Adjusted R-squared	0.571446	S.D. dependent var		0.502142
S.E. of regression	0.328723	Akaike info criterion		0.808673
Sum squared resid	9.617205	Schwarz criterion		1.429266
Log likelihood	-20.49867	Hannan-Quinn criter.		1.060568
F-statistic	7.080425	Durbin-Watson stat		1.899275
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil olah data dengan EViews 13.0

Dengan menggunakan model Fixed Effect Model, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 20,763 + 0,004 X_1 + 0,042 X_2 + 0,022 X_3 + \epsilon_{it}$$

Nilai konstanta (α) sebesar 20,763 menunjukkan nilai prediksi untuk rata-rata Belanja Modal jika semua variabel bebas yaitu Rasio Efektivitas, Efisiensi dan Kemandirian secara simultan pengaruhnya adalah 0 (nol).

Nilai koefisien Rasio Efektivitas yaitu sebesar 0,004 yang bernilai positif artinya terjadi pengaruh yang searah. Nilai tersebut menunjukkan bahwa jika Rasio Efektivitas mengalami kenaikan sebesar 1, maka akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0,004 dengan asumsi bahwa variabel independen lain bersifat tetap (konstan).

Nilai Rasio Efisiensi yaitu sebesar 0,042 yang bernilai positif artinya terjadi pengaruh yang searah. Nilai tersebut menunjukkan bahwa jika Rasio Efisiensi mengalami kenaikan sebesar 1, maka akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0,042 dengan asumsi bahwa variabel independen lain bersifat tetap (konstan).

Nilai koefisien Rasio Kemandirian yaitu sebesar 0,022 yang bernilai positif artinya terjadi pengaruh yang searah. Nilai tersebut menunjukkan bahwa jika Rasio Kemandirian mengalami kenaikan sebesar 1, maka akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0,022 dengan asumsi bahwa variabel independen lain bersifat tetap (konstan).

5. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (T)

Model	t_{hitung}	t_{tabel}	α	p	Keputusan	Kesimpulan
$X_1 \rightarrow Y$	2,238	1,982	0,05	0,027	H1 diterima	Signifikan

Model	t_{hitung}	t_{tabel}	α	p	Keputusan	Kesimpulan
$X_2 \rightarrow Y$	3,817	1,982	0,05	0,0002	H1 diterima	Signifikan

Model	t_{hitung}	t_{tabel}	α	p	Keputusan	Kesimpulan
$X_3 \rightarrow Y$	2,731	1,982	0,05	0,0076	H3 diterima	Signifikan

Sumber: Hasil olah data EViews 13.0

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Kemandirian secara parsial memiliki berpengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh periode 2020-2024.

b. Uji Simultan (F)

Model	F_{hitung}	F_{tabel}	α	p	Keputusan	Kesimpulan
$X_1, X_2, X_3 \rightarrow Y$	7,080	2,686	0,05	0,0000	H4 diterima	Signifikan

Sumber: Hasil olah data EViews 13.0

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Kemandirian secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh periode 2020-2024.

c. Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.665427
Adjusted R-squared	0.571446

Model	$R\ Square$	$Adjst.\ R-squared$
$X_1, X_2, X_3 \rightarrow Y$	0,665	0,571

Sumber: Hasil olah data EViews 13.0

Dari tabel di atas, diketahui nilai R Square yang diperoleh yaitu sebesar 0,665 yang menunjukan bahwa Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Kemandirian secara simultan memberikan kontribusi pengaruh sebesar 66,5% terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh periode 2020-2024, sedangkan sebanyak 33,5% sisanya merupakan besarnya kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan maka disimpulkan:

1. Rasio Efektivitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh periode 2020-2024.
2. Rasio Efisiensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh periode 2020-2024.
3. Rasio Kemandirian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh periode 2020-2024.

4. Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Kemandirian secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh periode 2020-2024

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R., Lestari, A., & Munandar, D. (2022). Pengelolaan APBD dan dampaknya terhadap pembangunan daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Anynda, N. S., & Hermanto, S. B. (2021). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*
- Ardhini (2011) Pengaruh rasio keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan publik dalam perspektif teori keagenan. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang.
- Auliya, N. W., & Hidajat, S. (2023). Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap belanja modal. *Jurnal Ekonomi Daerah*.
- Fernanda, M. A., Anwar, S., & Sunani, A. (2023). Pengaruh rasio efektivitas, efisiensi, dan kemandirian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan belanja modal sebagai variabel intervening di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Kebijakan belanja pemerintah daerah. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Kusuma, R. H., & Budiwitjaksono, G. S. (2023). Efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran belanja pada pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*.
- Lestari, I. I., Harianto, K., & Widuri, T. (2022). Analisis rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kemandirian dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa (2018–2021). *Jurnal Mahasiswa*.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Muzaki, M. Z., & Hapsari, M. T. (2022). Pengaruh rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi terhadap belanja modal pada pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2015–2021. *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Putri, R., & Rahmawati, S. (2019). Pengawasan internal dan kualitas belanja pemerintah

daerah. Jurnal Governance.

Rahmadi, S. (2025). Determinan Belanja Modal Provinsi di Indonesia: Pendekatan Analisis Ekonomi dan Sosial. Jurnal Paradigma Ekonomika.

Seftyawati Putri, R., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Jawa Barat (Studi Empiris pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2017). Audit dan Sistem Informasi Akuntansi.

www.djpk.kemenkeu.go.id (tentang Data APBD Murni, Realisasi APBD per tahun Prov. Aceh)

Zainul Muzaki, M., & Tanjung Hapsari, M. (2022). Pengaruh rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi terhadap belanja modal pada pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2015–2021. Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan.

Zulkarnain, M., Sadalia, I., & Fachruddin, K. A. (2017). Pengaruh rasio keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui alokasi belanja modal di kabupaten dan kota Provinsi Aceh. Tesis Universitas Sumatera Utara Medan.